# BAB I

# PENDAHULUAN

## Latar Belakang Penelitian

**Seiring dengan berkembangnya tatanan dunia baru** saat ini membuat negara-negara di dunia lebih berorientasi pada pola-pola yang lebih kooperatif. Perkembangan fenomena ini pun telah memasuki aspek-aspek baru, dimana Hubungan Internasional tidak hanya mengkaji tentang negara namun juga peran aktor non-negara yang bisa melakukan kerjasama. Disatu sisi juga Isu-isu mengenai Hubungan Internasional tidak hanya terpaku kepada *high politics* tetapi sudah merambah ke bidang sosial budaya, pendidikan dan yang lainnya.

Politik internasional merupakan salah satu wujud dari interaksi dalam hubungan internasional. Politik internasional membahas keadaan atau soal-soal politik di masyarakat internasional dalam arti yang lebih sempit; yaitu dengan berfokus pada diplomasi dalam hubungan antar Negara dan kesatuan-kesatuan politik lainnya. Politik internasional seperti halnya politik domestic terdiri dari elemen-elemen kerjasama dan konflik, permintaan dan dukungan, gangguan dan pengaturan. Negara membuat perbedaan antara kawan dan lawan. Politik internasional memandang tindakan suatu Negara sebagai respon atas tindakan Negara lain. Dengan kata lain, politik internasional adalah proses interaksi antara dua Negara atau lebih.[[1]](#footnote-1)

Salah satu masalah yang penting dalam politik internasional yang berbeda dari pola klasik zaman dahulu adalah soal manipulasi kepercayaan masyarakat dan pendapat rakyat oleh para pembuat keputusan. Timbulnya gerakan massa yang besar-besaran telah mengugurkan monopoli atas politik luar negeri oleh golongan elit yang cerdik saja. Massa rakyat dan cara berpikir mereka telah dipengaruhi oleh proses politik nasional dan internasional.

Perbedaan politik internasional dan politik luar negeri adalah Politik Luar Negeri hanya membahas bagaimana sebuah negara menanggapi serangkaian tindakan yang diambil berdasarkan analisis kondisi internasional, sedangkan politik internasional merupakan aksi-reaksi tindakan antarnegara. Bidang yang secara khusus membahas prinsip ‘aksi-reaksi’ ini adalah Politik Internasional.

Sebagai suatu disiplin ilmu dalam dunia modern politik internasional dianggap mulai muncul setelah terbitnya karya-karya Moseufelly dan kemudian disusun oleh Sir Belsin Beiken (abad ke-17), David (abad ke-18), M. Bernard (abad ke-19) dan banyak lagi para penulis lainnya seperti Hobbs, John Locke, Montesque, Aristoteles dan lain-lain. Setelah Perang Dunia II di Amerika Serikat muncul lagi penulis-penulis terkenal seperti Frederich Schumann, William Trvox, Kenneth N. Waltz, Yuan C. Chen, Hans J. Morgenthau dan lain-lain.

Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional.[[2]](#footnote-2) Kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh pemerintah suatu negara memang bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional masyarakat yang diperintahnya meskipun kepentingan nasional suatu bangsa pada waktu itu ditentutakan oleh siapa yang berkuasa pada waktu itu.[[3]](#footnote-3)

Negara indonesia yang sudah merdeka pada tahun 1945 mempunyai hubungan – hubungan dengan negara lain, Indonesia yang mempunyai letak yang strategis dibidang apasaja sangat diminati pihak negara lain untuk membangun kerjasama ,seperti kerjasama dalam budaya , militer,dan eksport import. Termasuk didalam asean sendiri , indonesia mempunyai hubungan dengan “negara tetangga” di asean seperti hubungan eksport import dengan filiphina , kerjasama di bidang perdagangan dengan singapura , kerjasama dibidang pertahanan dan militer dengan thailand , kerjasama dibidang budaya dengan myanmar , berjalannya waktu kerjasama luar negeri indonesia tidak selalu berjalan dengan baik , terkadang banyak masalah dengan negara tetangga termasuk dengan adanya ancaman ancaman yang mengancam keutuhan NKRI seperti masuknya ideologi dengan terselubung melalui kerjasama kerjasama luar negeri. Banyak hal yang dapat kita dapatkan dengan adanya kerjasama luar negeri ini, tinggal bagaimana kita menyikapi adanya hal baru dari luar yang masuk ke indonesia dengan baik.

Sebagai Negara berkembang, Indonesia banyak melakukan kerja sama internasional dengan negara-negara di dunia dalam berbagai bidang. Kerja sama internasional sebagai suatu bentuk hubungan diplomatik antara Indonesia dan negara-negara dilakukan guna menyokong kepentingan nasional negara indonesia itu sendiri. Selain itu, kerja sama juga dilakukan untuk mempererat hubungan indonesia dengan negara lain.

Kerjasama ini kemudian membentuk pola-pola hubungan yang *mutual* *gains,* yakni hubungan yang saling ketergantungan satu sama lain (hubungan interdepedensia). Implikasi dari adanya pola-pola hubungan kooperatif antara negara di dunia membuat isu-isu hubungan internasional semakin berkembang, memunculkan hubungan internasional kontemporer.

**Kerja sama internasional** dapat didefinisikan sebagai pola kerja sama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari struktur yang jelas dan lengkap serta diharapkan akan diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda.[[4]](#footnote-4)

Kerja sama internasional ini terutama dilakukan dengan negara-negara sahabat. Hingga saat ini, Indonesia telah membangun berbagai bentuk kerja sama internasional dengan lebih dari 160 negara di lima benua. Untuk memenuhi kepentingan nasionalnya, negara-negara tersebut melakukan berbagai macam kerja sama diantaranya adalah kerjasama bilateral.

Sejak merdeka, Indonesia terus berusaha untuk membangun negeri tercinta ini dengan segala usaha. salah satunya yaitu dengan melakukan pembangunan. Akan tetapi pembangunan yang dilakukan akan lebih mudah dan lebih cepat bila segala yang dibutuhkan terpenuhi. Sehingga untuk memenuhi segala kebutuhan yang tidak ada di tanah air, maka Indonesia membuat kerjasama dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhan. Selain itu dengan melakukan kerjasama bilateral, Indonesia juga akan terus mampu mengenalkan namanya di mata dunia. Dengan begitu Indonesia bisa eksis dan diakui di mata dunia. Karena dengan adanya pengakuan dari negara lain, tentu saja hal ini lebih memudahkan bagi Indonesia untuk menjalankan aktivitas dan memenuhi kesejahteraan rakyatnya. Bahkan kerjasama bilateral ini juga dilakukan hingga saat ini. Untuk melakukan kerjasama bilateral ini, biasanya akan dilakukan penandatanganan persetujuan atau agreement yang menjadi saksi atau bukti dari terbentuknya kerjasama bilateral yang dilakukan.

Terselenggaranya hubungan bilateral juga tidak terlepas dari tercapainya beberapa kesepahaman antara dua negara yang melakukan hubungan yang mana mereka mengabdi pada kepentingan nasionalnya dalam usaha untuk menyelenggarakan politik luar negerinya masing-masing. Dengan tujuan nasional yang ingin dicapai suatu bangsa dapat terlihat dari kepentingan nasional yang dirumuskan oleh elit suatu negara.

Belanda atau *Kingdom of the Netherlands* merupakan negara berbentuk kerajaan dengan sistem pemerintahan nya yaitu Demokrasi Parlementer dengan Raja sebagai Kepala negara dan Perdana menteri sebagai kepala pemerintahan.

[Raja Belanda](https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_penguasa_Belanda) adalah [kepala negara](https://id.wikipedia.org/wiki/Kepala_negara), kini dijabat oleh [Raja Willem-Alexander](https://id.wikipedia.org/wiki/Willem-Alexander_dari_Belanda). Menurut konstitusi Belanda, kedudukan kepala negara diperlengkapi oleh kuasa yang terbatas. Kepala negara dapat menggunakan pengaruhnya ketika [kabinet baru](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kabinet_Belanda&action=edit&redlink=1) hendak dibentuk, di mana pengaruh itu akan berperan sebagai penengah yang netral di antara partai-partai politik. Selain itu, raja (gelar ratu tidak memiliki keberartian konstitusional) berhak untuk diajak rapat, dan konsultasi. Bergantung kepada kepribadian, dan hubungan raja dengan dewan menteri, raja bisa saja *berpengaruh* melebihi *kekuasaan* yang diberikan oleh konstitusi.[[5]](#footnote-5)

Hubungan antara Indonesia dan Belanda diawali dengan belanda yang menjajah indonesia untuk mendapatkan kekayaan rempah-rempah yang dimiliki indonesia pada saat itu. Pada periode awal kemerdekaan indonesia, hubungan antara kedua negara diwarnai dengan berbagai perundingan dan konferensi serta aktivitas militer yang intens. Pada tanggal 27 desember 1949 di Den Haag telah disepakati Persetujuan Meja Bundar atau Konferensi meja bundar oleh kedua belah pihak sekaligus mengakhiri konflik antara Indonesia dan Belanda yang ditandai dengan penyerahan kekuasaan dari Belanda ke Indonesia.

Hubungan bilateral kedua negara sempat merenggang dikarenakan masalah pengembalian irian barat yang berujung pada pemutusan hubungan diplomatik kedua negara pada bulan agustus 1960. Dua tahun berselang, melalui Perjanjian New York yang ditanda tangani oleh Indonesia dan Belanda disepakati bahwa Belanda menyerahkan Irian Barat kepada Pemerintah sementara yaitu PBB (*Uited Nation Temporary Executive Administation, UNTEA*), yang kemudian menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia pada Mei 1963.

Secara umum hubungan bilateral Indonesia dan Belanda terus menguat, khususnya sejak adanya pengakuan secara moral dan politik Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 oleh pemerintah Belanda melalui pernyataan Menlu Ben Bot pada tahun 2005. Sejak itu, telah terjadi peningkatan intensitas kerjasama bilateral kedua Negara di berbagai bidang, yang salah satu indikatornya adalah peningkatan saling kunjung pejabat tinggi kedua negara.[[6]](#footnote-6)

Hubungan bilateral Indonesia dan Belanda diwarnai oleh intensifikasi kerja sama berlandaskan Deklarasi Bersama Kemitraan Komprehensif oleh kedua kepala pemerintahan pada bulan November 2013. Selama tahun 2014, tercatat pengembangan implementasi kerja sama bilateral pada lima bidang prioritas diantaranya Perdagangan dan investasi, Pengelolaan air, Infrastruktur dan logistik, Pertanian dan pangan dan Pendidikan.[[7]](#footnote-7)

Berkat adanya jalinan hubungan bilateral tersebut, pada 22 april 2016 antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Belanda menandatangani Nota kesepahaman atau MoU (*Memorandum of Understanding*) di bidang Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Retno L.P. Marsudi selaku Menteri Luar Negeri RI dan Jet Bussemaker selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Sains Belanda. Yang kemudian pada 13 Februari 2017 diadakan pertemuan The 1st Indonesia- Netherlands Joint Working Group (JWG) on Higher Education and Science (HES) yang merupakan tindak lanjut langkah kongkrit dari penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding- MoU) antara Indonesia dan Belanda tersebut.

Dari penjelasan diatas dapat kita lihat bahwa Kerja Sama bilateral antara Indonesia Belanda sangat penting dalam memajukan Pendidikan Tinggi serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, maka dari itu penyusun memutuskan untuk mengambil judul penelitian:

**“Kerjasama Indonesia-Belanda dalam Bidang Pendidikan Tinggi Melalui  *Memorandum of Understanding (MOU) On Higher Education and Science Cooperation* dan Pengaruhnya terhadap Peningkatan Kualitas Pendidikan di Indonesia*’’***

## Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas untuk memudahkan dalam menganalisa masalah, penyusun mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Dinamika Hubungan Bilateral Indonesia-Belanda?

2. Bagaimana Kerja Sama Indonesia-Belanda dalam bidang Pendidikan Tinggi melalui MoU *On Hugher Education and Science Cooperation*?

3. Bagaimana pengaruh Kerja Sama Indonesia-belanda terhadap peningkatan Kualitas Pendidikan di Indonesia?

## 1. Pembatasan Masalah

 Karena luasnya permasalahan yang ada, maka peneliti membatasi masalah penelitian dengan menitik beratkan pada **“Kerja Sama Indonesia Belanda dalam Bidang Pendidikan Melalui *Memorandum of Understanding (MoU) On Higher Education and Science Cooperation Tahun* 2016-2018”**

## 2. Perumusan Masalah

 Berdasarkan identifikasi masalah, untuk memudahkan penyusun dalam melakukan pembahasan, penyusun merumuskan masalah sebagai berikut :

**“Bagaimana Implementasi Kerja Sama Indonesia-Belanda dalam Bidang Pendidikan Melalui *MoU On Higher Education and Science Cooperation* dan pengaruhnya terhadap Menigkatnya Kualitas Pendidikan di Indonesia?”**

**C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

**1. Tujuan Penelitian**

Selain masalah-masalah yang telah disebutkan sebelumnya, penelitian ini pun memiliki beberapa tujuan. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Untuk mengetahui bagaima dinamika hubungan bilateral Indonesia dan Belanda

b. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai hasil dari kerjasama bilateral Indonesia-Belanda dalam bidang pendidikan melalui *MoU On Higher Education and Science Cooperation*.

c. Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dari Kerja Sama Bilateral Indonesia-Belanda dalam Bidang Pendidikan.

## 2. Kegunaan Penelitian

a. Untuk menambah wawasan pengetahuan tentang berbagai aspek yang saling berkaitan dalam bidang kerja sama bilateral antara Indonesia-Belanda dalam bidang pendidikan.

b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada disiplin Ilmu Hubungan Internasional khususnya mengenai peran sebuah Kerja Sama Bilateral yang bertujuan untuk mencapai kepentingan negara-negara di dunia.

c. Untuk menambah pengalaman dan pengetahuan dan melaksanakan penelitian yang berpedoman pada metode dan teknik yang bersifat ilmiah. Sekaligus mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh penulis selama belajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Hubungan Internasional Universitas Pasundan.

1. Howard Lentner, *Foreign Policy Analysis: A Comparative and Conceptual Approach,* (Ohio: Bill and Howell Co), hlm. 2. [↑](#footnote-ref-1)
2. Jack C. Plano dan Roy Olton,*Kamus Hubungan Internasional*(Bandung: Abardin,1999), hlm.5. [↑](#footnote-ref-2)
3. Mochtar Mas’oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi* (Jakarta: LP3ES, 1994) hlm.184. [↑](#footnote-ref-3)
4. Teuku May Rudi, *Teori, Etika dan Kebijakan Hubungan Internasional,* (Bandung:Angkasa.1993), hal. 3 [↑](#footnote-ref-4)
5. Wikipedia bahasa indonesia ‘’Belanda’’ dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Belanda diakses pada 9 maret 2018, 20.16 WITA [↑](#footnote-ref-5)
6. Kementerian Luar Negeri RI ‘’Profil Negara dan Kerja Sama’’ dalam https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/detail-kerjasama-bilateral.aspx?id=93 diakses pada 20 Maret 2018, 10.46 WIB [↑](#footnote-ref-6)
7. Kementerian Luar Negeri RI ‘’Buku Diplomasi Indonesia 2014’’ dalam https://www.kemlu.go.id/Buku/Buku%20Diplomasi%20Indonesia%202014.pdf#search=MoU%20Indonesia%20bulan%20on%20Higher%20Education diakses pada 20 Maret 2018 15.09 WIB [↑](#footnote-ref-7)